

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Badan Legislatif Daerah yang merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan unsur istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk desa, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagian dari pajak dan retribusi Kabupaten untuk desa, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

BAB II

PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dasar pengeluaran keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahun anggaran melalui Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa

Pasal 5

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa;
- c. Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat;
- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi;

- g. Hibah;
- h. Sumbangan pihak ketiga;
- i. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 6

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pasal 7

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 terdiri dari :
 - a. Belanja langsung;
 - b. Belanja tidak langsung.
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tak Terduga.

Pasal 8

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diatas meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pada pasal 8 terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa;
 - c. Pembayaran utang.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam Rapat Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa, bila perlu dihadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan khusus dibidang perencanaan pembangunan Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBDesa

Pasal 11

- (1) Rancangan APBDesa diajukan oleh pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas guna memperoleh persetujuan.
- (2) dalam rangka pembahasan APBDesa BPD dan Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa guna menampung aspirasi dan keinginan masyarakat.
- (3) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat dan sebagai laporan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam pembahasan rancangan APBDesa sekurang-kurangnya harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka pimpinan BPD bersama Kepala Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.

- (4) Apabila dalam rapat kedua kalinya sesuai dengan maksud ayat (3), belum mencapai Qorum sesuai dengan ketentuan ayat (1), rapat dinyatakan tidak sah, untuk itu maka pimpinan BPD dan kepala desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat kedua.
- (5) Dalam hal rapat ketiga kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai Qorum sesuai dengan maksud ayat (1), maka rapat dapat dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Camat.

Pasal 14

Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dilakukan secara musyawarah/mufakat serta harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) APBDesa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa, dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bentuk Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Apabila rancangan APBDesa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa tidak disetujui oleh BPD, maka Pemerintah Desa menjalankan APBDesa tahun lalu.

BAB V
PENGELOLAAN APBDesa

Pasal 17

- (1) Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBDesa dan atau Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

BAB VI

MEKANISME PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

Pasal 18

- (1) Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan APBDesa, Kepala Desa mengangkat seseorang sebagai Bendaharawan Desa untuk mengelola keuangan Desa.
- (2) Bendaharawan Desa wajib menyelenggarakan administrasi desa.

Pasal 19

Bendaharawan Desa adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima menyimpan dan membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa, surat-surat berharga milik desa serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19 diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan Bendaharawan Desa berasal dari Perangkat Desa dan atau dari kalangan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat adanya larangan rangkapan jabatan/tugas, maka Perangkat Desa tidak dibenarkan diangkat menjadi Bendaharawan Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa terdapat larangan jabatan/tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa mengangkat Bendaharawan Desa yang berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan khusus dibidang keuangan dengan persetujuan BPD.

- (3) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Bendaharawan Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB VII

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 22

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 23

Pengeluaran keuangan Desa tidak dapat dibebankan kepada APBDesa, jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APBDesa.

Pasal 24

Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 25

Peminjaman Desa tidak dibenarkan untuk membiayai Belanja Rutin.

BAB VIII

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 26

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun Belanja Desa, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD membuat perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB IX

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 27

Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang perhitungan Anggaran Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (5) Bentuk Peraturan Desa tentang penghitungan Anggaran Desa akan diatur berdasarkan pedoman anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

Bendaharawan Desa selaku pelaksana pengelola Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan tugasnya.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa selaku penanggungjawab pengelola APBDesa dan atau Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintahan Desa memberikan Laporan pertanggungjawaban keseluruhan pelaksanaan pengelolaan APBDesa kepada BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penilaian BPD.
- (3) Penilaian BPD terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa berupa menerima, menerima dengan syarat dan menolak.
- (4) Tata cara mengenai penilaian BPD terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 31

Pelaksanaan APBDesa selama 1 (satu) tahun anggaran yang telah mendapat persetujuan BPD dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan tembusannya kepada Camat paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan dibentuk yang baru.

Hal ini dimaksudkan agar supaya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa lebih efektif dan efisien melalui usaha peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui penggunaan Anggaran maka diperlukan suatu pedoman dan tata cara penyusunan APBDesa secara menyeluruh.

Melalui Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai pembentukan APBDesa, Tata Cara penyusunan APBDesa, mekanisme pembahasan dan penetapan APBDesa, pengelolaan APBDesa, Tata Usaha Keuangan Desa, Perubahan APBDesa, Perhitungan Anggaran Desa. Disamping itu juga diatur mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDesa serta adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Adat.
- Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan khusus adalah memiliki pendidikan minimal tamatan STM, SMEA dan sejenisnya bila perlu memiliki pendidikan Strata Satu Sarjana Teknik dan Sarjana Ekonomi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Adat.
- Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan khusus adalah memiliki pendidikan minimal tamatan STM, SMEA dan sejenisnya bila perlu memiliki pendidikan Strata Satu Sarjana Teknik dan Sarjana Ekonomi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

- Setiap Peraturan Desa tentang APBDesa wajib diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Peraturan Desa dinyatakan berlaku apabila diundangkan dalam ketentuan ini adalah belum ditandatangani oleh Kepala Desa meskipun telah disetujui oleh BPD.

Ayat (2)

- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa wajib diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

- Larangan adanya rangkapan jabatan/tugas bagi Bendaharawan Desa lebih memfokuskan diri dalam mengelola Keuangan Desa.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "memiliki kemampuan khusus dibidang keuangan" menurut ketentuan ini adalah memiliki pendidikan minimal SMEA dan/atau Sarjana Ekonomi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan menerima adalah BPD dapat menerima semua laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tanpa adanya catatan ataupun koreksi.
- Yang dimaksud dengan menerima dengan syarat adalah BPD dapat menerima laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi terdapat catatan-catatan sebagai bahan koreksi untuk perbaikan laporan pertanggungjawaban.
- Yang dimaksud dengan menolak adalah BPD menolak secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 4 Oktober

2010



Keputusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.